

ANALISIS GINI RATIO KABUPATEN DELI SERDANG 2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN DELI SERDANG**

<https://deliserdangkab.bps.go.id>

ANALISIS GINI RATIO KABUPATEN DELI SERDANG 2017



ANALISIS GINI RATIO

KABUPATEN DELI SERDANG 2017

ISBN : 978-602-6374-86-8

Katalog : 3206003.1212

Nomor Publikasi : 12120.1813

Ukuran Buku : 21 X 28 cm

Jumlah Halaman : x + 34 halaman

Naskah :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Penyunting :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Gambar Kulit :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Diterbitkan Oleh :

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang

Dicetak Oleh :

CV Rilis Grafika

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik”

KATA PENGANTAR

Publikasi “Analisis Gini Ratio Kabupaten Deli Serdang 2017” merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang dalam usaha memenuhi permintaan data dari konsumen baik dari pemerintah maupun swasta.

Publikasi ini merupakan hasil pengumpulan data melalui kuesioner Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) melalui Daftar VSEN.KP yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dan dirancang untuk menghasilkan data konsumsi/pengeluaran makanan dan bukan makanan rumah tangga.

Pada kesempatan ini disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Deli Serdang, sehingga terbitnya publikasi ini. Penyajian dalam publikasi ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan publikasi ini selanjutnya.

Akhir kata semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Lubuk Pakam, September 2017

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Deli Serdang



Ir. Tuti Hidayati, M.Si
NIP. 19661211 199401 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
I. PENDAHULUAN.....	1
II. KONSEP DAN METODOLOGI.....	7
2.1 Kajian Teori.....	9
2.2 Definisi Variabel.....	10
2.3 Pendekatan Penghitungan Ketimpangan Pendapatan.....	11
2.4 Sumber Data.....	13
III. PEMBAHASAN.....	15
3.1 Perkembangan PDRB Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 – 2017.....	17
3.2 Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 – 2017.....	18
3.3 Pola Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 – 2017.....	20
3.4 Pola Pergerakan Koefisien Gini Tahun 2014 – 2017.....	25
3.5 Kriteria Bank Dunia.....	27
LAMPIRAN.....	29

DAFTAR TABEL

Tabel	A1	PDRB per Kapita Kabupaten Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2014 – 2017 (Rupiah).....	19
Tabel	A2	Persentase Pengeluaran Rata – rata per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran Makanan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 – 2017.....	22
Tabel	A3	Persentase Pengeluaran Rata – rata per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran Non Makanan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 – 2017.....	23
Tabel	A4	Persentase Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan Menurut Sub Kelompok Aneka Barang dan Jasa di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 – 2017	
Tabel	A5	Peringkat Koefisien Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 - 2017.....	25
Tabel	A6	Distribusi Pendapatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015 – 2017 Menurut Kriteria Bank Dunia.....	26
Tabel	1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014 – 2017 (Milyar Rupiah).....	27
Tabel	2	Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan Menurut Sub Kelompok Pengeluaran Makanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 - 2017.....	31
Tabel	3	Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita per Bulan Menurut Sub Kelompok Pengeluaran Bukan Makanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 - 2017.....	32
Tabel	4	Koefisien Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2017.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz.....	12
Gambar	2	Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Deli Serdang dan Sumatera Utara Tahun 2014 – 20167.....	17
Gambar	3	Persentase Rata - rata Konsumsi per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 - 2017.....	21
Gambar	4	Pengeluaran Konsumsi Bukan Makanan Menurut Komoditi Pengeluaran di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017	24

BAB I

PENDAHULUAN



Makna dari pembangunan nasional adalah agar dapat meningkatkan seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat, bangsa serta negara yang merupakan proses pengembangan dalam keseluruhan dari sistem penyelenggaraan negara agar dapat mewujudkan tujuan nasional itu sendiri. Dalam pengertian lain, pembangunan nasional sendiri dapat diartikan sebagai rangkaian agar pembangunan saling berkesinambungan serta meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara supaya dapat melaksanakan tugas untuk mewujudkan tujuan nasional.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari hasil evaluasi pembangunan. Pencapaian serta evaluasi hasil-hasil pembangunan saat ini menjadi pembahasan utama di berbagai wilayah Indonesia. Evaluasi terhadap pencapaian hasil-hasil pembangunan yang sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat memberi alternatif bagi setiap daerah untuk melakukan perubahan-perubahan kebijakan pembangunan.

Sebagai suatu proses, maka pembangunan ekonomi mempunyai kaitan dan pengaruh antara faktor-faktor di dalamnya yang dapat menghasilkan pembangunan ekonomi tersebut. Selanjutnya pembangunan ekonomi akan tercermin pada kenaikan pendapatan per kapita dan perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu keberhasilan usaha negara tersebut untuk mendistribusikan pendapatan secara adil dan merata serta dapat mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di negara tersebut.

Salah satu cerminan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah meningkatnya pendapatan riil per kapita penduduk. Agar pendapatan perkapita riil penduduk terus meningkat, maka dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang tumbuh dengan cepat dapat didorong dengan peningkatan atau penambahan faktor produksi modal (*capital*).

Namun perlu diingat bahwa pembangunan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali mengabaikan aspek pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Hal ini muncul karena untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, penambahan kapital akan lebih berperan dari pada penambahan tenaga kerja. Proporsi faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa akan berpengaruh terhadap balas jasa yang akan diterima oleh masing-masing faktor produksi tersebut.

Untuk itu, setiap kreativitas kebijakan ekonomi diharapkan mampu untuk dapat mengusulkan perubahan paradigma yang lebih difokuskan hal-hal yang terkait kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh semua kalangan, terutama masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Masalah pokok negara berkembang adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan atau tingkat kemiskinan atau jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ketimpangan yang makin tinggi antar golongan dan antar wilayah ini dapat memunculkan masalah kecemburuan sosial, kerawanan disitegrasi wilayah dan disparitas ekonomi yang makin lebar dan tajam.

Hal ini terjadi akibat perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh setiap individu dimana suatu individu/kelompok mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan individu/kelompok lain. Tidak meratanya distribusi pendapatan memicu terjadinya ketimpangan pendapatan yang merupakan awal dari munculnya masalah kemiskinan. Membiarkan kedua masalah tersebut berlarut-larut akan semakin memperparah keadaan, dan tidak jarang menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kondisi sosial dan politik.

Ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan merupakan sebuah realita yang ada di tengah-tengah masyarakat dunia ini baik di negara maju maupun negara berkembang, Perbedaannya terletak pada proporsi tingkat ketimpangan dan angka kemiskinan yang terjadi, serta tingkat kesulitan mengatasinya yang dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk suatu negara.

Distribusi pendapatan nasional yang tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara umum. Pembangunan daerah yang tidak memfokuskan pada masalah kemiskinan hanya akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja. Sehingga ini menjadi isu sangat penting dalam menyikapi angka kemiskinan hingga saat ini.

Oleh karena itu, diperlukan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Salah satu bentuk upaya tersebut dijabarkan dalam misi pemerintah Kabupaten Deli Serdang yaitu “Mendorong pembangunan yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang maju, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta didukung oleh kondisi keamanan yang kondusif, dan menghormati hak azasi manusia”.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki wilayah sangat luas terdiri dari 22 kecamatan dengan sumber daya alam, dan kegiatan ekonomi penduduk yang berbeda, serta memiliki topologi wilayah yang cukup beragam. Keadaan ini menimbulkan perbedaan kecepatan pembangunan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Deli Serdang.

Masalah kemiskinan salah satunya disebabkan oleh ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di masyarakat. Meskipun perekonomian Kabupaten Deli Serdang terus mengalami perkembangan setiap tahunnya, tetapi distribusi pendapatan tetap bisa diabaikan. Perekonomian Kabupaten Deli Serdang secara umum masih ditopang oleh sektor industri dan sebagian sektor pertanian. Ketimpangan ekonomi pada umumnya muncul apabila hasil pembangunan ekonomi hanya dinikmati oleh para pemilik modal atau golongan tertentu.

Dengan dasar pemikiran tersebut maka perlu dilakukan kajian untuk dapat melihat tingkat kesenjangan baik dilihat sisi ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan antar wilayah. Koefisien Gini (*Gini Ratio*) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk. Sedangkan PDRB per kapita sebagai pendekatan pendapatan per kapita dapat digunakan untuk melihat ketimpangan antar wilayah.

BAB II

KONSEP DAN METODOLOGI



2.1. Kajian Teori

Disamping peningkatan pendapatan, pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu tujuan dari pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai pendekatan pendapatan. Walaupun hal ini tidak dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, namun paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Pemerataan hasil pembangunan biasanya dikaitkan dengan masalah ketimpangan, kesenjangan, dan kemiskinan. Secara logika, semakin besar jurang pemisah (*gap*) antara kelompok penduduk kaya dan miskin berarti kemiskinan semakin meluas. Dengan demikian, orientasi pemerataan merupakan upaya untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran ketidakmerataan pendapatan sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum Simon Kuznets menyampaikan hipotesanya. Pareto (1897), melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Eropa, mendapatkan bentuk kurvanya (untuk setiap negara) tidaklah mengikuti distribusi normal, tetapi mengikuti perumusan sebagai berikut:

$$A = \frac{N}{X^b}$$

Dimana ;

A = Jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan lebih besar daripada X,

N = Jumlah penduduk total,

b = Parameter yang nilainya antara 1 dan 2.

Berdasarkan hasil tersebut, Pareto menyatakan bahwa akan selalu ditemui ketimpangan dalam setiap negara, dimana kelompok penduduk yang terkaya mendapatkan porsi yang terbanyak dari pendapatan nasional negaranya. Penemuannya ini selanjutnya dikenal sebagai *Pareto Law*, yang menyatakan bahwa 20 persen kelompok penduduk terkaya menikmati 80 persen dari pendapatan nasional negaranya.

Pengukuran tingkat pemerataan pendapatan sejak lama menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Namun, pendekatan pengukuran yang sering digunakan untuk mengukur ketidakmerataan dari distribusi pendapatan adalah *Gini Coefficient* yang dibantu dengan menggunakan *Kurva Lorentz*.

Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Dalam hal ini, analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Dalam analisis ini akan digunakan tiga ukuran untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan yaitu: Koefisien Gini (*Gini Ratio*), kurva Lorentz dan Ukuran Bank Dunia.

2.2. Definisi Variabel

Berikut konsep dan defenisi variabel yang digunakan dalam publikasi ini adalah:

- a) **Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)** adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu Negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dan bertujuan melihat struktur ekonomi. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur dan menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi.
- b) **PDRB per kapita atas dasar harga berlaku** adalah gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat adanya aktivitas produksi pada tahun yang berlaku. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku biasanya digunakan untuk menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.
- c) **Konsumsi** adalah tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna ekonomi suatu benda. Atau dengan definisi lain yaitu pengeluaran total untuk memperoleh barang dan jasa dalam dalam jangka waktu tertentu. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan, selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan.

- d) **Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan** adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

2.3. Pendekatan Penghitungan Ketimpangan Pendapatan

A. Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus Koefisien Gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f p_i x (F c_i + F c_{i-1})$$

Dimana:

GR = Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

$f p_i$ = Frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke- i

$F c_i$ = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke- i

$F c_{i-1}$ = Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke ($i-1$)

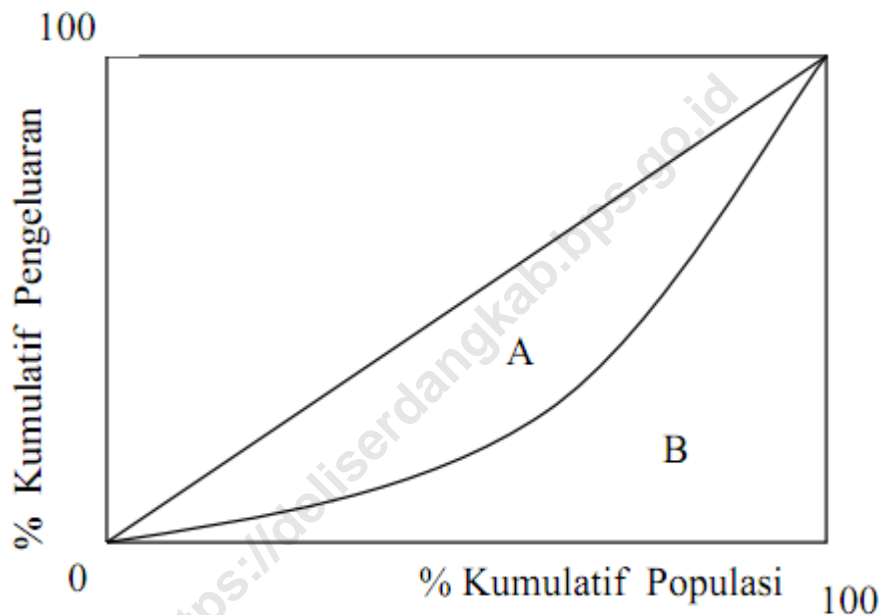
Nilai Koefisien Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai Koefisien Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan juga semakin tinggi. Bila nilai Koefisien Gini mendekati satu maka terjadi ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan, begitu juga yang terjadi sebaliknya.

Untuk publikasi resmi BPS, baik ukuran ketidakmerataan pendapatan versi Bank Dunia maupun Koefisien Gini, penghitungannya menggunakan data pengeluaran. Menurut Todaro (1981) angka Koefisien Gini untuk negara-negara sedang berkembang dinyatakan bahwa distribusi pendapatan sangat timpang jika angka gini terletak antara 0,5 sampai 0,7 dan relatif sama ketimpangannya jika nilainya antara 0,2 sampai 0,3.

B. Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz

Selain itu, tingkat ketimpangan dapat diukur juga melalui *personal income* dengan menggunakan Kurva Lorenz, yaitu yang menggambarkan hubungan kuantitatif antara persentase populasi penerima pendapatan dengan persentase total pendapatan yang benar-benar diperoleh selama jangka waktu tertentu, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 1. Koefisien Gini Menurut Kurva Lorenz



Pada Gambar 1. tersebut sumbu horizontal mewakili jumlah populasi penerima pendapatan dan sumbu vertikal menggambarkan pendapatan yang diterima oleh masing-masing presentase penduduk (Todaro, 1981). Garis Kurva Lorenz akan berada di atas garis horizontal, bila kurva tersebut menjauh dari kurva diagonal maka tingkat ketimpangan akan semakin tinggi.

Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi seragam (*uniform*) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk Koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambarkan pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambarkan pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1. Garis

diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ Koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ Koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Oshima menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi Untuk itu ditentukan kriteria sebagai berikut:

- ❖ Ketimpangan taraf rendah, bila $G < 0,3$
- ❖ Ketimpangan taraf sedang, bila G antara $0,3 - 0,5$
- ❖ Ketimpangan taraf tinggi, bila $G > 0,5$

C. Kriteria Bank Dunia

Bank Dunia mengelompokkan penduduk ke dalam tiga kelompok sesuai dengan besarnya pendapatan: 40% penduduk dengan pendapatan rendah, 40% penduduk dengan pendapatan menengah dan 20% penduduk dengan pendapatan tinggi. Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan penduduk dari kelompok yang berpendapatan 40% terendah dibandingkan total pendapatan seluruh penduduk. Kategori ketimpangan ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

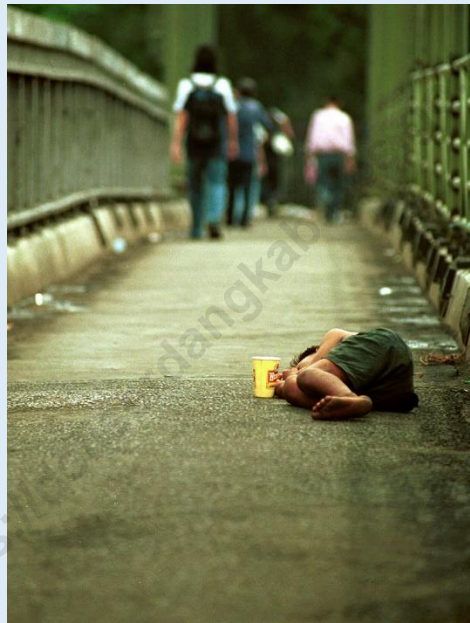
- Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12 persen maka dikategorikan memiliki ketimpangan pendapatan tinggi;
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 persen maka dikategorikan memiliki ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
- Jika proporsi jumlah pendapatan penduduk yang masuk kategori 40 persen terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17 persen maka dikategorikan memiliki ketimpangan pendapatan rendah.

2.4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam publikasi ini adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dan untuk melengkapi digunakan juga beberapa sumber data lain seperti data PDRB.

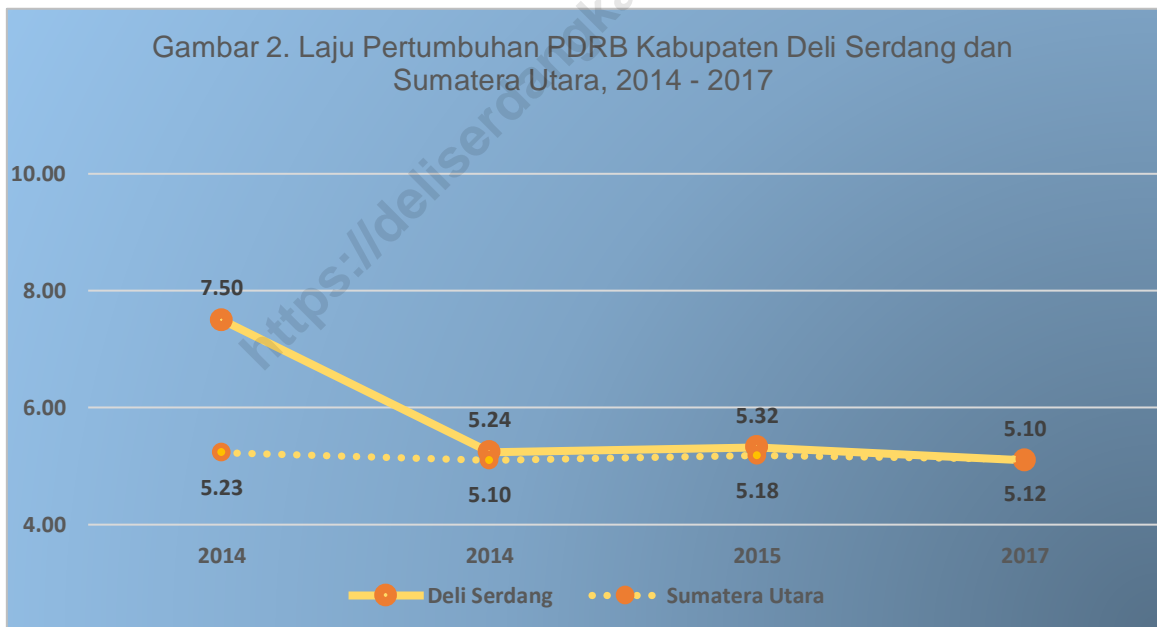
BAB III

PEMBAHASAN



3.1. Perkembangan PDRB Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 – 2017

Kabupaten Deli Serdang jika dilihat dari dari konstribusinya terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 menyumbangkan sekitar 13,49 persen terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara dan merupakan penyumbang terbesar kedua setelah Kota Medan. Sementara itu, sektor industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB Kabupaten Deli Serdang yaitu sebesar 31,43 persen. Kondisi ini didukung karena Kabupaten Deli Serdang memiliki beberapa sentra industri yaitu di Kecamatan Sunggal, Tanjung Morawa (Kawasan Industri Medan Star) dan Percut Sei Tuan (Kawasan Industri Medan-2). Sektor Industri Pengolahan merupakan sektor penyumbang terbesar untuk PDRB Kabupaten Deli Serdang. Selain sektor industri pengolahan, penyumbang terbesar kedua adalah sektor perdagangan besar dan eceran termasuk reparasi mobil dan sepeda motor yaitu 16,65 persen.



Perekonomian Kabupaten Deli Serdang selama empat tahun terakhir cenderung mengalami perlambatan ekonomi. Dimana pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mencapai 7,50 persen, sedangkan tahun 2017 hanya sebesar 5,10 persen. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang mengalami pola relatif yang sama. Sejak tahun 2014 sampai 2017 terus mengalami perlambatan ekonomi setiap tahunnya. Pada tahun 2017 kembali melambat meskipun tidak terlalu signifikan yaitu kurang dari 0,3 persen. Peningkatan pembangunan ekonomi diharapkan akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan pendapatan dan lapangan kerja. Hal ini tentunya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan peningkatan kualitas SDM akan meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi dan membantu peningkatan penciptaan nilai tambah ekonomi.

3.2. Perkembangan PDRB per Kapita Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 - 2017

Data pendapatan rumah tangga per kapita untuk masih belum tersedia, oleh karena itu pengukuran kesejahteraan masyarakat suatu wilayah umumnya didekati dengan dua pendekatan (*proxy*) pendapatan yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan pengeluaran konsumsi per kapita. Walaupun kedua nilai tersebut tidak menggambarkan pendapatan riil penduduk akan tetapi secara empiris terbukti dapat memberikan gambaran pendapatan penduduk sebagai indikator kesejahteraan masyarakat suatu wilayah.

Tingkat pendapatan suatu wilayah selain dari kemampuan ekonomi wilayah tersebut juga tergantung jumlah penduduk yang ada di wilayah tersebut, jadi wilayah yang mempunyai nilai PDRB tertinggi belum tentu memiliki PDRB per kapita yang tinggi apabila jumlah penduduk wilayah tersebut sangat besar.

Peningkatan pendapatan yang tinggi merupakan salah satu ukuran terhadap meningkatnya pendapatan dan tingkat kemakmuran masyarakat. Pendapatan masyarakat ini didekati dengan PDRB per kapita. PDRB per kapita dihitung dengan membagi nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Untuk memacu peningkatan PDRB per kapita, maka laju pertumbuhan ekonomi harus jauh lebih besar dari pada laju pertumbuhan penduduk.

Namun demikian perlu diperhatikan bahwa PDRB perkapita yang disajikan disini belum memperhitungkan pendapatan yang keluar pendapatan yang masuk ke Kabupaten Deli Serdang (*Net Factor Income From Abroad*). Sehingga pendapatan perkapita yang disajikan disini belum sepenuhnya menggambarkan pendapatan riil masyarakat. Kesulitan memperoleh data pendapatan yang keluar-masuk Kabupaten Deli Serdang tersebut, menyebabkan PDRB perkapita tersebut digunakan sebagai pendekatan untuk mengukur rata-rata pendapatan penduduk.

Tabel A1. PDRB Per Kapita Kabupaten Deli Serdang Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2014 – 2017 (Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan
(1)	(2)	(3)
2014	35 071 929,41	28 113 375,66
2015	37 813 697,53	28 937 186,78
2016	41 086 202,19	29 837 900,25
2017	44 071 079,20	30 734 437,46

Berdasarkan penghitungan atas dasar harga berlaku, PDRB per kapita Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017 mencapai 44,07 juta rupiah. Walaupun angka ini masih belum dikurangi dengan pendapatan yang keluar dan masuk Deli Serdang, namun telah menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Begitu juga halnya dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan yang terus meningkat sampai dengan tahun 2017 hingga mencapai 30,73 juta rupiah.

3.3. Pola Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 – 2017

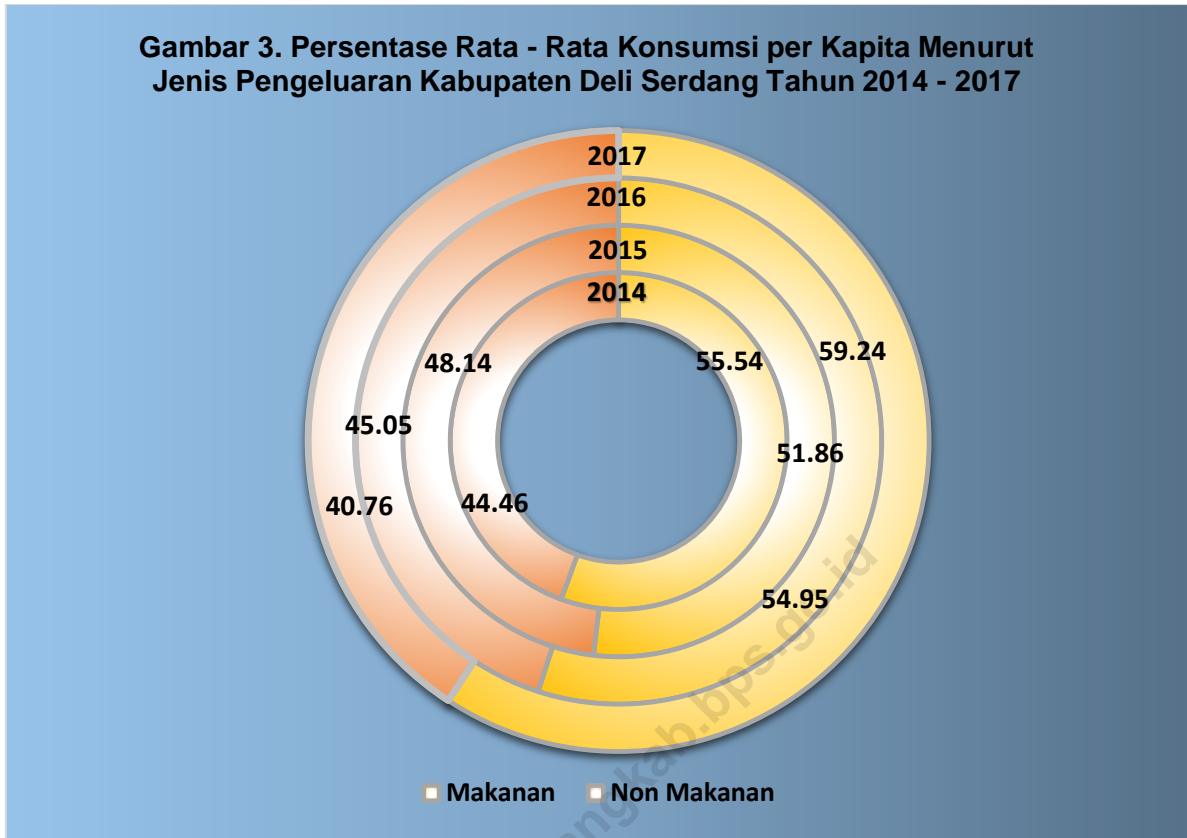
Secara makro ekonomi, pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh penting dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan konsumsi rumah tangga memberikan pemasukan kepada pendapatan nasional. Kebanyakan negara pengeluaran untuk konsumsi sekitar 60-75 persen dari pendapatan nasional. Selain itu, konsumsi rumah tangga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi dari antar waktu

Konsumsi untuk makanan dan bukan makanan pada dasarnya saling berkaitan. Dalam kondisi pendapatan terbatas, pemenuhan kebutuhan makanan akan didahulukan sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Seiring dengan peningkatan pendapatan, maka lambat laun akan terjadi pergeseran pola komposisi konsumsi, yaitu penurunan porsi yang dibelanjakan untuk makanan dan peningkatan porsi yang dibelanjakan untuk bukan makanan.

Pergeseran pola komposisi konsumsi terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan secara umum masih rendah, sedangkan elastisitas permintaan terhadap kebutuhan bukan makanan relatif tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan, sedangkan sisa pendapatan dapat disimpan sebagai tabungan atau diinvestasikan.

Dari Gambar 3 terlihat bahwa pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Deli Serdang selama tahun 2014 sampai 2017 mengalami perubahan meskipun tidak terlalu besar. Terlihat pada tahun 2014 pengeluaran untuk konsumsi makanan sebesar 55,54 persen dan bukan makanan sebesar 44,46 persen. Persentase pengeluaran untuk makanan turun pada tahun 2015 menjadi 51,86 persen dan sisanya bukan makanan. Hal ini dikarenakan ada beberapa komoditi non makanan yang pengeluarannya mengalami kenaikan. Sebaliknya, pola konsumsi non makanan meningkat dari 44,46 persen tahun 2014 menjadi 48,14 persen tahun 2016.

Gambar 3. Persentase Rata - Rata Konsumsi per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 - 2017



A. Konsumsi Makanan

Selama kurun waktu dua tahun terakhir terjadi pergeseran pola konsumsi kelompok makanan dan non makanan. Pada tahun 2016 persentase pengeluaran per kapita untuk konsumsi kelompok makanan sebesar 54,95 persen meningkat menjadi 59,24 persen pada tahun 2017. Meningkatnya persentase pengeluaran kelompok makanan terjadi karena adanya peningkatan konsumsi pada semua jenis komoditi makanan kecuali padi-padian dan rokok seperti terlihat pada Table A2.

Tabel A2. Persentase Pengeluaran Rata – rata per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran Makanan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 – 2017

Jenis Komoditi	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Padi-padian	8,20	7,13
Umbi-umbian	0,58	0,59
Ikan	6,47	7,68
Daging	1,95	2,74
Telur dan susu	3,60	3,42
Sayur-sayuran	5,39	5,15
Kacang-kacangan	0,88	1,09
Buah-buahan	2,04	2,68
Minyak dan kelapa	2,00	1,97
Bahan Minuman	1,69	1,82
Bumbu-bumbuan	0,78	0,95
Konsumsi lainnya	0,64	0,86
Makanan jadi	11,96	15,14
Rokok	8,77	8,02
Makanan	54,95	59,24

Sumber : BPS Kabupaten Deli Serdang 2016-2017

B. Konsumsi Non Makanan

Selama tahun 2016 sampai 2017 persentase pengeluaran konsumsi per kapita per bulan untuk kelompok bukan makanan mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2016 persentase pengeluaran konsumsi per kapita per bulan untuk kelompok bukan makanan sebesar 45,05 persen turun menjadi 40,76 persen. Komoditi kelompok bukan makanan yang mengalami penurunan adalah perumahan dan fasilitas rumah, aneka barang dan jasa, pakaian, alas kaki dan tutup kepala. Penurunan paling besar pada komoditi perumahan dan fasilitas rumah, yaitu turun sebesar 3,58 persen.

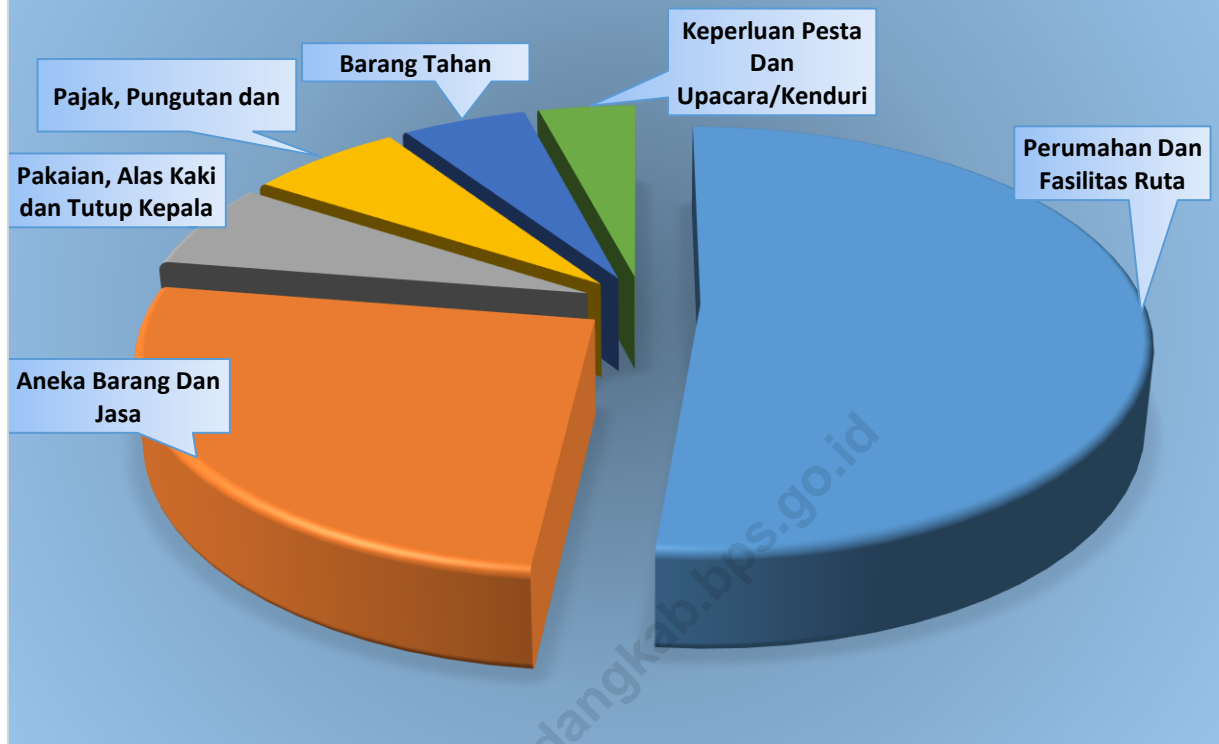
Tabel A3. Persentase Pengeluaran Rata – rata per Kapita per Bulan Menurut Jenis Pengeluaran Non Makanan di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 – 2017

Jenis Komoditi	2016	2017
(1)	(2)	(3)
Perumahan dan fasilitas rumah	24,64	21,06
Aneka barang dan Jasa	13,08	10,55
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	2,99	2,68
Barang yang tahan lama	1,92	2,65
Pajak, pungutan dan asuransi	1,55	2,15
Keperluan pesta dan upacara	0,87	1,67
Non Makanan	45,05	40,76

Sumber : BPS Kabupaten Deli Serdang 2016-2017

Jika dilihat pada tahun 2017 persentase pengeluaran konsumsi per kapita per bulan dari seluruh komoditi bukan makanan (51,67 persen) terbesar adalah untuk komoditi perumahan dan fasilitas rumah tangga atau sebesar 21,06 persen dari total pengeluaran rumah tangga. Komoditi perumahan dan fasilitas rumah juga merupakan komoditi yang paling besar mengalami penurunan konsumsi pada tahun 2017. Sedangkan komoditi dengan pengeluaran konsumsi per kapita per bulan paling kecil adalah pada kelompok non makanan adalah keperluan pesta dan upacara yaitu sebesar 4,11 persen atau 1,67 dari total pengeluaran rumah tangga.

Gambar 4. Pengeluaran Konsumsi Bukan Makanan Menurut Komoditi Pengeluaran di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017



Selain kelompok perumahan dan fasilitas rumah tangga yang mengalami pengeluaran konsumsi terbesar pada tahun 2017. Komoditi lain yang perlu diperhatikan pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah komoditi aneka barang dan jasa dalam hal ini yaitu biaya kesehatan dan pendidikan. Hal ini dikarenakan dengan dua komponen tersebut kinerja pemerintah apakah sudah dilaksanakan dengan baik atau tidak meskipun perlu penelitian lebih lanjut lagi berdasarkan data dan kondisi di masa lalu.

Pada tahun 2017 persentase pengeluaran konsumsi untuk kesehatan sebesar 2,00 persen. Konsumsi ini naik bila dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebelumnya sebesar 1,48 persen. Sementara itu untuk kelompok pendidikan pada tahun tahun 2016 sebesar 3,39 persen turun menjadi 3,12 persen pada tahun 2017.

Tabel A4. Persentase Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan Menurut Sub Kelompok Aneka Barang dan Jasa di Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016 – 2017

Jenis Komoditi	2016	2017
(1)	(4)	(5)
Biaya Kesehatan	1,48	2,00
Biaya Pendidikan	3,39	3,12
Aneka Barang, Transportasi dan Jasa	8,21	10,55

3.4. Pola Pergerakan Koefisien Gini Tahun 2014 -2017

Koefisien gini merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Koefisien gini Kabupaten Deli Serdang sepanjang tahun 2014 sampai 2017 cenderung mengalami perubahan yang relatif kecil. Pada tahun 2014 koefisien gini berada di angka 0,2724, yang berarti bahwa Kabupaten Deli Serdang memiliki ketimpangan pendapatan yang rendah. Pada tahun 2016 koefisien gini naik menjadi 0,3159 yang berarti bahwa kesenjangan pendapatan di Kabupaten Deli Serdang meningkat dengan kategori kesenjangan sedang.

Seiring tahun berjalan koefisien gini bergerak turun kembali pada tahun 2017 menjadi 0,2823. Hal ini berarti ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Deli Serdang berada di level rendah yang juga berarti bahwa pemerataan pendapatan di Kabupaten Deli Serdang meningkat. Pada tahun yang sama tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Deli Serdang juga masih berada di bawah ketimpangan Provinsi Sumatera Utara. Nilai koefisien gini Sumatera Utara pada tahun 2017 sebesar 0,3150.

Jika diurutkan menurut ketimpangan pendapatan yang rendah sampai yang tinggi dari keseluruhan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Maka Kabupaten Deli Serdang sepanjang tahun 2014 sampai 2016 stabil berada di urutan 14 se-Sumatera Utara. Sedangkan pada tahun 2017 menempati urutan ke 21 se-Sumatera Utara.

Tabel A5. Peringkat Koefisien Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2017

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nias	11	17	12	3
Mandailing Natal	9	15	19	14
Tapanuli Selatan	10	7	4	1
Tapanuli Tengah	20	21	24	29
Tapanuli Utara	23	20	25	27
Toba Samosir	21	32	23	24
Labuhan Batu	22	28	22	20
Asahan	15	12	16	11
Simalungun	18	29	33	23
Dairi	19	16	15	12
Karo	27	19	13	25
Deli Serdang	14	14	14	21
Langkat	16	22	18	9
Nias Selatan	1	1	7	2
Humbang Hasundutan	12	9	3	8
Pakpak Bharat	6	23	17	19
Samosir	13	30	29	15
Serdang Bedagai	4	8	11	16
Batubara	8	6	1	13
Padang Lawas Utara	3	3	6	10
Padang Lawas	26	10	10	17
Labuhan Batu Selatan	2	4	5	7
Labuhan Batu Utara	5	5	8	18
Nias Utara	7	13	9	6
Nias Barat	17	2	2	5
Sibolga	30	26	27	26
Tanjung Balai	33	31	20	30
Pematangsiantar	25	24	21	28
Tebing Tinggi	32	18	28	33
Medan	28	33	31	32
Binjai	24	11	26	4
Padangsidempuan	29	25	30	22
Gunung Sitoli	31	27	32	31

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Utara

3.5. Kriteria Bank Dunia

Pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau perkembangannya, karena upaya pemerintah dalam pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan jangka panjang. Selain indikator tersebut indikator lain yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan pembagian pendapatan adalah pengukuran tingkat kesenjangan distribusi pendapatan berdasarkan metode Bank Dunia.

Pola pengukuran distribusi pendapatan Bank Dunia membagi jumlah populasi penduduk kedalam tiga kelompok, yaitu 40 persen berpendapatan rendah, 40 persen berpendapatan menengah dan 20 persen berpendapatan tertinggi. Kelompok yang 20 persen umumnya dikatakan kelompok ter kaya, sedangkan kelompok yang 40 persen terendah umumnya digolongkan kepada kelompok termiskin dan kelompok lainnya dimasukkan sebagai kelompok masyarakat kelas menengah.

Kelompok yang menjadi fokus dalam penghitungan berdasar kriteria Bank Dunia adalah kelompok 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok ini menunjukkan distribusi pendapatan di wilayah tersebut semakin merata.

Tabel A6. Distribusi Pendapatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2015– 2017 Menurut Kriteria Bank Dunia

Kriteria Bank Dunia	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
40 % Terbawah	22,25	22,74	22,73
40 % Menengah	36,23	39,82	39,44
20 % Atas	41,52	37,44	37,83

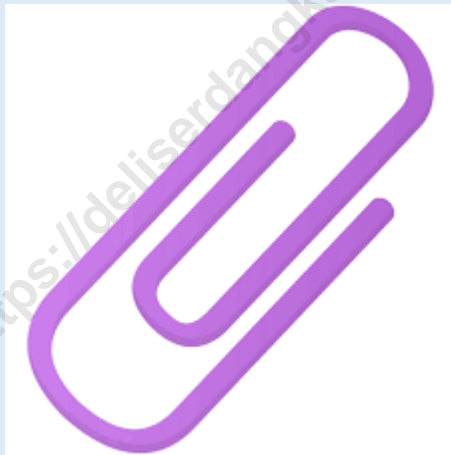
Kelompok yang menjadi fokus dalam penghitungan berdasar kriteria Bank Dunia adalah kelompok 40 persen penduduk dengan pendapatan rendah. Semakin besar persentase pendapatan yang dinikmati oleh kelompok ini menunjukkan distribusi pendapatan di wilayah tersebut semakin merata.

Dengan menggunakan kriteria Bank Dunia, Kabupaten Deli Serdang pada tahun 2017 termasuk dalam daerah yang memiliki ketimpangan distribusi pendapatan rendah, hal ini terlihat dari pendapatan yang dikuasai oleh 40 persen penduduk berpendapatan terbawah menguasai 22,74 persen dari total pendapatan penduduk Kabupaten Deli Serdang. Sedangkan 20 persen penduduk berpendapatan teratas menguasai 37,44 persen dari total pendapatan penduduk Kabupaten Deli Serdang.

Jika dilihat dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada pergeseran yang nyata untuk rasio kelompok pendapatan Kabupaten Deli Serdang di dari tahun 2015-2017. Sekitar 77 persen kelompok pendapatan menengah dan tinggi menguasai distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Hal ini mengandung pengertian bahwa dampak kemajuan pembangunan lebih dirasakan oleh penerima pendapatan kelompok menengah dan tinggi.

<https://deliserdangkab.go.id>

LAMPIRAN



Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015 – 2017 (Milyar Rupiah)

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Nias	2 442,51	2 676,67	2 966,28	3 233,75
2. Mandailing Natal	8 757,77	9 586,34	10 661,04	11 712,55
3. Tapanuli Selatan	9 310,33	10 058,36	10 963,97	11 983,06
4. Tapanuli Tengah	6 516,46	7 140,28	7 849,65	8 555,48
5. Tapanuli Utara	5 429,33	5 855,61	6 300,29	6 765,69
6. Toba Samosir	5 173,39	5 622,45	6 140,47	6 656,29
7. Labuhan Batu	22 176,00	24 083,11	26 505,24	29 030,57
8. Asahan	24 328,57	26 479,52	29 189,60	32 023,19
9. Simalungun	25 338,49	27 147,46	30 191,08	32 860,29
10. Dairi	6 268,08	6 823,16	7 433,42	8 044,63
11. Karo	13 817,09	15 150,36	16 728,42	18 060,75
12. Deli Serdang	69 674,06	76 734,63	85 152,02	93 193,89
13. Langkat	27 875,25	30 741,65	33 949,47	37 023,33
14. Nias Selatan	4 298,08	4 729,43	5 194,79	5 684,36
15. Humbang Hasundutan	4 050,10	4 413,20	4 776,17	5 124,65
16. Pakpak Bharat	753,92	826,18	911,09	996,48
17. Samosir	2 838,07	3 143,18	3 442,98	3 751,36
18. Serdang Bedagai	18 457,29	20 152,38	22 113,82	24 094,59
19. Batubara	23 461,26	25 397,32	27 498,71	29 962,41
20. Padang Lawas Utara	7 447,52	8 221,91	9 077,41	9 902,55
21. Padang Lawas	7 288,06	7 852,53	8 807,42	9 691,16
22. Labuhan Batu Selatan	17 600,72	19 052,15	21 004,17	23 196,31
23. Labuhan Batu Utara	16 262,17	17 620,18	19 374,23	21 161,68
24. Nias Utara	2 318,65	2 525,97	2 777,63	3 008,01
25. Nias Barat	1 184,00	1 288,53	1 415,85	1 548,74
Kota				
71. Sibolga	3 429,31	3 835,52	4 262,85	4 644,67
72. Tanjungbalai	5 439,08	6 051,92	6 722,59	7 424,96
73. Pematangsiantar	9 555,16	10 566,33	11 579,29	12 443,86
74. Tebing Tinggi	3 912,18	4 288,36	4 729,18	5 123,22
75. Medan	148 247,32	164 721,83	186 049,04	204 299,85
76. Binjai	7 649,06	8 382,41	9 077,47	9 857,85
77. Padangsidimpuan	4 001,06	4 424,51	4 913,28	5 372,88
78. Gunung Sitoli	3 212,36	3 594,86	4 038,52	4 504,05
Sumatera Utara	521 954,95	571 722,01	628 394,16	690 937,11

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2014-2017

Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka Sangat Sementara

Tabel 2. Persentase Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita per Bulan Menurut Sub Kelompok Pengeluaran Makanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2017

Jenis Komoditi	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Padi-padian	9,29	8,24	8,20	7,13
Umbi-Umbian	0,48	0,47	0,58	0,59
Ikan/Udang/Cumi/Kerang	7,25	6,79	6,47	7,68
Daging	1,85	0,32	1,95	2,74
Telur dan Susu	3,49	3,59	3,60	3,42
Sayur-Sayuran	4,94	4,23	5,39	5,15
Kacang-Kacangan	1,22	0,88	0,88	1,09
Buah-buahan	2,58	1,89	2,04	2,68
Minyak dan Lemak	2,54	2,17	1,99	1,97
Bahan Minuman	1,75	1,68	1,69	1,82
Bumbu-Bumbuan	0,98	0,96	0,79	0,95
Konsumsi Lainnya	0,64	0,65	0,64	0,85
Makanan dan Minuman Jadi	9,89	11,36	11,95	15,14
Tembakau Dan Sirih	8,63	8,62	8,76	8,02
Makanan	55,54	51,86	54,95	55,84

Sumber : SUSENAS 2014-2017

Tabel 3. Persentase Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan Menurut Sub Kelompok Pengeluaran Bukan Makanan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014 - 2017

Jenis Komoditi	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perumahan dan Fasilitas Rumah Tangga	16,68	26,42	24,64	21,06
Aneka Barang dan Jasa	19,65	13,29	13,08	10,55
Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	3,52	3,04	2,99	2,68
Barang Tahan Lama	2,19	2,03	1,92	2,65
Pajak, Pungutan dan Asuransi	1,73	2,09	1,55	2,15
Keperluan Pesta Upacara/Kenduri	0,70	1,28	0,87	1,67
Bukan Makanan	44,46	48,14	45,05	40,76

Sumber : SUSENAS 2014-2017

Tabel 4. Koefisien Gini Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 – 2017

Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. N i a s	0,278	0,262	0,249	0,249
2. Mandailing Natal	0,276	0,279	0,287	0,252
3. Tapanuli Selatan	0,252	0,226	0,235	0,253
4. Tapanuli Tengah	0,308	0,303	0,359	0,306
5. Tapanuli Utara	0,300	0,305	0,356	0,329
6. Toba Samosir	0,344	0,302	0,328	0,292
7. Labuhan Batu	0,327	0,296	0,306	0,279
8. Asahan	0,263	0,277	0,274	0,267
9. Simalungun	0,329	0,356	0,319	0,255
10. D a i r i	0,277	0,274	0,279	0,240
11. K a r o	0,287	0,271	0,337	0,268
12. Deli Serdang	0,275	0,272	0,316	0,281
13. Langkat	0,308	0,279	0,267	0,249
14. Nias Selatan	0,207	0,235	0,241	0,269
15. Humbang Hasundutan	0,257	0,223	0,267	0,298
16. Pakpak Bharat	0,312	0,277	0,303	0,256
17. Samosir	0,331	0,318	0,287	0,287
18. Serdang Bedagai	0,254	0,260	0,291	0,275
19. Batubara	0,250	0,211	0,283	0,233
20. Padang Lawas Utara	0,215	0,234	0,269	0,250
21. Padang Lawas	0,257	0,253	0,297	0,248
22. Labuhan Batu Selatan	0,223	0,227	0,261	0,220
23. Labuhan Batu Utara	0,239	0,238	0,300	0,267
24. Nias Utara	0,264	0,252	0,261	0,269
25. Nias Barat	0,211	0,220	0,252	0,247
71. Sibolga	0,322	0,311	0,354	0,323
72. Tanjungbalai	0,335	0,290	0,365	0,278
73. Pematangsiantar	0,312	0,294	0,358	0,349
74. Tebing Tinggi	0,286	0,314	0,398	0,303
75. M e d a n	0,396	0,322	0,374	0,352
76. B i n j a i	0,260	0,308	0,252	0,316
77. Padangsidempuan	0,318	0,319	0,317	0,324
78. Gunung Sitoli	0,325	0,348	0,367	0,346
Sumatera Utara	0,334	0,311	0,336	0,315

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Utara 2014-2017

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN DELI SERDANG**

Jl. Karya Utama Komplek Pemkab Deli Serdang
Lubuk Pakam 20514 | Telp./Fax 061-7951326
Email: bps1212@bps.go.id
Website: <https://deliserdangkab.bps.go.id>

ISBN 978-602-6374-86-8

